

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Adanya perkembangan pelaporan keuangan di dalam sektor publik yang tersedia di Indonesia bisa terlihat peningkatannya pada tuntutan dari masyarakat pada akuntabilitas dari seluruh lembaga yang bersifat publik. Adanya peningkatan ini tentunya dapat memberikan dorongan pada pemerintah untuk selalu meningkatkan penerapan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik dalam konteks di dalam organisasi pemerintah diartikan sebagai sebuah penyampaian informasi mengenai kegiatan serta hasil yang berhubungan dengan finansial dari pemerintah pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas laporan-laporan tersebut. Namun menurut (Mardiasmo, 2006), akuntabilitas publik ini berarti sebuah kewajiban dalam memberikan tanggung jawab atas berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan atau misi dari sebuah organisasi di dalam melakukan pencapaian atas sebuah tujuan yang mana telah direncanakan sebelumnya.

Proses membuat sebuah laporan keuangan adalah salah satu kebutuhan yang bersifat transparansi yang menjadi salah satu syarat untuk mendukung sebuah akuntabilitas yang meliputi keterbukaan pihak pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki publik. Usaha yang dilakukan guna menciptakan adanya keterbukaan serta pertanggung jawaban suatu perjalanan keuangan yang dimiliki pemerintah yang dilakukan dengan mampu memberikan penyampaian atas laporan keuangan. Penegakan akuntabilitas ini yang secara khusus

merupakan kinerja yang berhubungan dengan finansial harus dipublikasikan oleh pemerintah daerah yang ditujukan pada pihak yang berkepentingan.

Rendahnya mutu dari laporan keuangan ini seringkali menjadi sebuah masalah di dalam sebuah organisasi di Indonesia, misalnya pada OPD di beberapa daerah di Indonesia. Pembuatan OPD memiliki dasar hukum yang telah berlaku dari tahun 2004 yaitu Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. OPD diharuskan mampu memberikan peningkatan pada kualitas laporan keuangan untuk mampu mencapai pemenuhan karakteristik pada laporan keuangannya. Adanya peningkatan pada mutu dari laporan keuangan ini akan mampu mempermudah penentuan atas kebijakan untuk pemerintahan dan mampu memberikan berbagai informasi yang baik pada beberapa pihak seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pada setiap periode, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) biasanya mendapatkan penilaian seperti opini yang didapat dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian pada sebuah laporan keuangan yang diberikan BPK mencerminkan adanya kewajaran dan kualitas yang baik di dalam laporan keuangan tersebut. Atas dasar hasil proses audit yang dilakukan BPK, terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki penyajian laporan keuangan yang belum wajar. Hasil pemeriksaan pada semester I di tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat 113 entitas dengan opini WTP, 267 entitas dengan opini WDP, dan 31 entitas dengan opini TMP. Atas dasar hasil tersebut mampu mencerminkan adanya penyusunan laporan keuangan yang lemah. Hal ini menjadi fenomena yang menarik tentang kualitas dari laporan keuangan yang dapat dikaji kembali. Pada keadaan sebenarnya, masih banyak laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah yang tidak disesuaikan dengan keadaan

sebenarnya dan tidak mampu menerapkan prinsip yang telah berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, status wajar tanpa pengecualian (WTP) tak menjadi acuan kementerian atau Lembaga penerima bebas korupsi. Pasalnya, audit dan opini WTP tidak didesain menjadi tolak ukur ada atau tidaknya praktik korupsi (CNN Indonesia.com).

Baru-baru ini kasus Korupsi Dana Hibah PEN Pariwisata Buleleng merebak ke public dan sudah 7 tersangka di tahan peristiwa tersebut terjadi pada 18 Februari 2021. “Pelaku usaha ada yang mengembalikan sepanjang uang lebih apa yang seharusnya. Contoh, umpunya hotel harga Rp 550 ribu di SPJ kan Rp 1 juta. Itu, sebenarnya Dinas Pariwisata mau ambil karena ketahuan duluan tidak jadi mengambil. Uang lebih tersebut dikembalikan oleh pihak rekanan” kata Jayalantara (Kodafi, 2021).

Kualitas informasi keuangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk sistem informasi akuntansi. Untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sistem informasi akuntansi yang baik bagi entitas pelapor. (Mulyadi, 2016) Sistem Informasi Akuntansi oleh Sistem Akuntansi (SIA) yakni organisasi yang mengoordinasikan formulir, catatan, dan laporan untuk menyediakan kebutuhan manajemen informasi keuangan untuk memfasilitasi operasi bisnis. .. Jika setiap orang di organisasi Anda dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, mereka dapat menggunakannya secara efektif. Adanya alasan itu, begitu penting untuk anggota organisasi dapat memahami dan memprediksi kegunaan sistem (Purnamawati & Saerce, 2020). Menurut sebuah studi oleh (Putriasri Pujanira dan Taman, 2017), adopsi AIS memiliki dampak positif pada kualitas hubungan ekonomi.

Penelitian (Diani, 2014) menunjukkan hasil sebaliknya, namun penerapan SIA tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang dapat berperan dalam kualitas laporan keuangan yakni pemahaman sistem. Sebuah sistem (Romney & Steinbart, 2015) adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang memiliki kaitan yang melakukan interaksi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa memahami suatu sistem adalah kemampuan untuk memahami sekumpulan sistem untuk mencapai tujuan bisnis. Penelitian sebelumnya oleh (Diani, 2014) mendapatkan hasil bahwa pemahaman sistem mampu memberikan dampak bagi kualitas laporan keuangan. Kebalikan hasil studi diperoleh oleh (Hanafi, 2012) pemahaman sistem tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan OPD adalah standar akuntansi pemerintah. SAP menurut (PP No. 71 Tahun 2010) diartikan sebagai kebijakan akuntansi yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah. Ucuhan yang dimaksud adalah prinsip akuntansi, validitas historis, realisme, kualitas formal, frekuensi, informasi yang konsisten dan lengkap serta penyajian yang benar.

Adanya standar dari pemerintah saat pembuatan laporan keuangan tentunya memberi dampak pasti pada kualitas laporan keuangan. Adanya standar keuangan ini maka penyusunan yang dilakukan terhadap laporan keuangan tidak keluar jalur. Akan tetapi, bisa jadi sebaliknya kualitas laporan keuangan bisa buruk karena ini merupakan kewajiban OPD maka tidak jarang pembuatan laporan keuangan hanya ala kadarnya untuk memenuhi kewajiban sehingga mempengaruhi kualitas laporan

keuangan. Penelitian oleh (Adhi dan Suhardjo, 2013) mendapatkan hasil bahwa SAP berperan secara positif bagi kualitas laporan keuangan OPD.

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari (Pujanira & Taman, 2017), dengan penambahan variabel pada riset ini ialah pembedanya yakni variabel pemahaman sistem akuntansi daerah dan lokasi yang berbeda dimana (Pujanira & Taman, 2017) mengambil tempat penelitian pada Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Buleleng. Pemilihan Kabupaten Buleleng sebagai subjek penelitian karena pada laporan keuangan OPD Buleleng periode 2019-2020 mendapat banyak masukan oleh BPK agar kualitas laporan keuangan meningkat (Darma, 2020) dari latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk meneliti **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Status sudah WTP tapi tidak mengindikasikan bebas dari adanya kecurangan dalam pelaporan.
2. Masih terdapatnya kontradiksi dan inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu membuat penelitian dengan dasar pendapatan OPD ini masih menarik untuk dilakukan.

3. Ketidaksamaan hasil antar penelitian terdahulu.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus maka perlu pembatasan masalah.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan OPD di Buleleng.
2. Variabel independen penelitian ini adalah SIA, SAP, pemahaman sistem dan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada OPD di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada OPD di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah pemahaman sistem berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah pada OPD di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sistem terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini harus menjadi referensi tambahan dalam proses pengembangan ilmiah dan literatur informasi untuk memperluas pengetahuan terkait OPD. Kajian ini juga harus dapat memperdalam pengetahuan dan informasi tentang dampak sistem informasi akuntansi, pemahaman sistem, dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Penelitian ini juga harus dapat menguji beberapa teori, seperti teori keagenan di balik penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penyedia Pelayanan

Bagi penyedia layanan, hasil penelitian ini perlu menginformasikan kepada mereka tentang masalah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan mereka dan meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka untuk membantu

pemangku kepentingan dalam laporan keuangan. Selain itu, survei ini juga menjadi tolak ukur peningkatan kualitas laporan keuangan..

b. Manfaat Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya. Dengan begitu, mereka dapat memberikan kontribusi ilmiah, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang melaksanakan disertasinya pada mata kuliah yang sama.

c. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Hasil dari riset ini diharapkan untuk dapat dipelajari topik dan makalah penelitian serupa dan menggunakannya sebagai bahan untuk mengembangkan tingkat studi yang lebih tinggi.

